

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atok, Rosyid Al, 2015, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Setara Press, Malang.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2006, *Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- _____, 2006, *Perihal Undang-Undang*, cetakan pertama, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- _____, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, edisi kedua cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cetakan keenam, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, dan Syahrizal, Ahmad, 2012, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ball, Alan R. and Peters, B. Guy, 2000, *Modern Politics and Government*, sixth edition, Macmillan Press Ltd, Hampshire RG21 6XS and London.
- Busroh, Abu Daud, 2010, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Daryanto, dkk, 2013, *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Haryono, Dodi, 2012, *Ilmu Perundang-Undangan*, UR PRESS, Pekanbaru Riau.
- Huda, Ni'matul dan Nazriyah R., 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung.

- Indrati, Maria Farida, 2000, *Masalah Hak Uji Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Teori Perundang-Undangan*, Seri Buku Ajar, FH UI, Jakarta.
- _____, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- _____, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Isra, Saldi, 2018, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, edisi kedua cetakan keempat, Depok, Rajagrafindo.
- Lubis, M. Solly, 1995, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Mandar Maju, Bandung.
- Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana, 1993, *Beberapa Masalah Hukum Tatanegara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Natabaya, H.A.S, 2006, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Palguna, I Dewa Gede, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complain): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Purba Elvis F. dan Simanjuntak, Parulian, 2012, *Metode Penelitian*, Percetakan Sadia, Medan.
- Redi, Ahmad, 2017, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2011, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafino Persada, Jakarta.
- Sinaga, Budiman N.P.D., 2005, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, UII Press, Yogyakarta.

- Sirajuddin, 2015, *Legislative drafting (Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)*, Setara Press, Malang.
- Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta.
- Sulaiman, King Faisal, 2014, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2017, *Teori Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, cetakan pertama, Thafa Media, Yogyakarta.
- Ranggawidjaya, Rosyid, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Mandar Maju, Bandung.
- Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo, Jakarta.

B. Makalah

- Indrati, Maria Farida, 2021, “Konstitusionalisme Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Webinar Seri Kelima Kuliah Umum Konstitusi, Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Universitas Islam Indonesia, *via teleconference zoom meeting*, 30 Agustus 2021.
- Lubis, Fadlansyah, 2021, “Latar Belakang Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Kementerian/Kepala Lembaga,” Webinar Kewajiban Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kementerian/Kepala Lembaga, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *via teleconference zoom meeting*, 18 Agustus 2021.
- Setiadi, Wicipto, 2021, “Perpres No.68 Tahun 2021 Tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Permen/Perkalembaga dan Reformasi Regulasi,” Webinar Kewajiban Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kementerian/Kepala Lembaga, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *via teleconference zoom meeting*, 18 Agustus 2021.
- Sjarif, Fitriani Ahlan, 2021, “Kewajiban Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kementerian/Lembaga: Menganalisa dari Ilmu Perundang-Undangan dan untuk tujuan Penataan

Regulasi”, Webinar Kewajiban Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kementerian/Kepala Lembaga, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *via teleconference zoom meeting*, 18 Agustus 2021.

Usfunan, Jimmy Z., 2021, “Kapasitas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkup Pemerintah: Kelembagaan dan SDM”, Webinar Kapasitas Kelembagaan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *via teleconverence zoom meeting*, 21 Juni 2021.

C. Jurnal Hukum

Aziz, Machmud, “Landasan Formil dan Materiil Konstitusional Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 6, Nomor 3, September, 2009.

Aditya, Zaka Firman dan Winata, M Reza “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 9, Nomor 1, Juni, 2018.

Apendi, Sofyan, “Ketiadaan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi dalam Sistem Hukum Nasional”, *Pakuan Law Review*, Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni, 2021.

Bumiarta, I Nyoman Prabhu Buana, “Kedudukan Peraturan Menteri Pada Konstitusi”, *Jurnal Kerta Dyatmika*, Volume 12, Nomor 2, 2015.

Firdaus dan Donny Michael, “Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Non Struktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 19, Nomor 3, 2014.

Huda, Ni'matul, “Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri dalam Perspektif Sistem Presidensial”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volime 3, Nomor 28, September, 2021.

Monterio, Josef Mario, “Tanggung Jawab Presiden Atas Kebijakan Menteri yang Menimbulkan Korupsi Berdasarkan Sistem

- Presidensial dan Teori Kewenangan”, *Kertha Patrika Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 39, Nomor 2, Agustus, 2017.
- Nababan, Budi S.P, “*Executive Review/Administrative Review: Perspektif Kewenangan dan Pengawasan*”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 1, Nomor 2, 2021.
- Octovina, Ribkha Annisa, “Sistem Presidensial di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan (Cosmogov)*, Volume 2, Nomor 2, Oktober, 2018.
- Simatupang, Taufik H., “Mendudukan Konsep *Executive Review* dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 19, Nomor 2, Juni, 2019.
- Waaldijk, Kees, “The Character of Scholarly Legal Research: Paradigms, Problems, Questions, Hypotheses, Sources, Methods”, Universitas Leiden, 6th Draft, August, 2009.
- Wibowo, Bagas Novantyo, A.L.W, Lita Tyesta dan Hardjanto, Untung Sri, “Kewenangan Executive Review Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Penataan Regulasi”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 10, Nomor 1, 2021.
- Yani, Ahmad, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 12, Nomor 2, Juli, 2018.
- Andi Yuliyani, “Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 Nomor 4, Desember 2017.
- Yulistyowati, Efi, Pujiastuti, Endah dan Mulyani, Tri, “Penerapan Konsep *Trias Politica* dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volime 18, Nomor 2, Desember, 2016.
- Zamroni, Mohammad, “Kekuasaan Presiden dalam Mengeluarkan Perpu”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 12, Nomor 3, September, 2015.

D. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda>, diakses pada 10 Desember 2021.

Fitria Chusna Farisa, 2022, “Saat Jokowi Mendadak Minta Permenaker soal JHT Direvisi, padahal Peraturan Menteri Terbit atas Persetujuan Presiden”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/06100071/saat-jokowi-mendadak-minta-permenaker-soal-jht-direvisi-padahal-peraturan?page=all>, diakses pada 23 Maret 2022.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Data Peraturan Menteri, <https://peraturan.go.id/peraturan/jenis.html?id=11e449f371bb47e09607313231373436>, diakses pada 8 November 2021.

Putra, Antoni, 2021, “Masalah Persetujuan Presiden dalam Pembentukan Peraturan”, <https://koran.tempo.co/read/opini/467788/mengapa-kewajiban-persetujuan-presiden-dalam-pembentukan-peraturan-bermasalah>, diakses pada 15 April 2022.

Salim, Zafrullah, tanpa tahun, “Legislasi Semu (*Pseudowetgeving*)”, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1299:legislasi-semu-pseudowetgeving&catid=100:hukum-tata-negaraperundang-undangan&Itemid=180, diakses pada 10 April 2022.

Yuliandri, 2019, “Kedudukan SKB Menteri dalam Peraturan Perundang-Undangan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-skb-menteri-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt5c401dcce8628>, diakses pada 2 April 2022.

E. Karya Ilmiah

Lamanau, Yulius Koling, 2021, “Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Puspitaningrum, Jayanti, 2009, “Pengaturan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan UUD 1945”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Saputra, Nurhadi, 2011, “Kedudukan dan Fungsi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dalam Pemerintahan di Indonesia”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Wibowo, Muhammad Aziz Sulisty, 2018, “Penguatan *Executive Preview* dalam Pembentukan Peraturan Daerah sebagai Upaya Mengantisipasi Peraturan Daerah Bermasalah”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

F. Dokumen Lembaga

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2017, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2010, “Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan di Luar Hierarki Berdasarkan UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019, “Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya”, Jakarta, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2021, “Buku Panduan Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2021”, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus DPR RI Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, DPR RI, Jakarta, 27 Januari 2011.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020, “Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024”, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Jakarta.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, “Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)”, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Soegiyono, 2015 Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Jakarta.

G. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5729).

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84).

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 173).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1753).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non kementerian, atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Non struktural Oleh Perancang Peraturan Perundang- Undangan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1134).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 127).

H. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 137/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.